

JAF (Journal of Accounting and Finance), Vol.8, No.1, pp. 1-11, 2024

Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Irfandi A. Noyo^{*}, Muliati², Yulia Gita Samir³, dan Kasmawati⁴

¹ Affiliation: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univeristas Tadulako, Palu, Indonesia

² Affiliation: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univeristas Tadulako, Palu, Indonesia

³ Affiliation: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univeristas Tadulako, Palu, Indonesia

⁴ Affiliation: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univeristas Tadulako, Palu, Indonesia

*Corresponding author: muliati.akuntansi@gmail.com

Received: 12 Juli 2023; **Revised:** 10 November 2023; **Published online:** 16 April 2024

To cite this article: Noyo,Irfandi A., Muliati, Samir,Yulia Gita, & Kasmawati. (2024). Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, vol.8(1), pp.1-11.
<https://doi.org/10.25124/jaf.v8i1.6310>

To link to this article: <https://doi.org/10.25124/jaf.v8i1.6310>

Abstract

Sustainable development is an abstract idea with complex goals and different aspects. This research was conducted to determine how sustainability can be measured, especially in Indonesia. This study describes sustainability as balancing economic, social, environmental, and legal development and management. The method of analysis in this study is quantitative but within the framework of descriptive analysis. Descriptive analysis is done by looking at the data through graphs and tables. Sustainable development is assessed in two ways. The first uses partial development indicators, and the second uses a composite index. This study provides one of the empirical pieces of evidence that sustainability requires a high level of balance between dimensions (economic, social, environmental, legal, and governance).

Keywords: *Sustainable development; Composite index*

Abstrak

Pembangunan berkelanjutan adalah ide abstrak dengan tujuan yang kompleks dan aspek yang berbeda. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keberlanjutan dapat diukur, khususnya di Indonesia. Dalam studi ini, keberlanjutan digambarkan sebagai keseimbangan antara pembangunan dan pengelolaan ekonomi, sosial, lingkungan dan hukum. Metode analisis dalam penelitian ini adalah kuantitatif, namun dalam kerangka analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan melihat data dalam bentuk grafik dan tabel. Pembangunan berkelanjutan dinilai dengan dua cara. Pertama menggunakan indikator pembangunan parsial dan kedua menggunakan indeks komposit. Kajian ini memberikan salah satu bukti empiris bahwa keberlanjutan mensyaratkan tingkat keseimbangan yang tinggi antar dimensi (ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola).

Kata Kunci : *Pembangunan berkelanjutan; Indeks komposit*

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) mencuat naik ke perdebatan global setelah *Millennium Development Goals* (MDGs) tidak dilaksanakan sesuai dengan agenda sebelumnya. Basis gagasan SDGs menggambarkan pengembangan lebih lanjut dari MDGs. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan ingin dicapai pada tahun 2030, tetapi melalui tantangan dan bukan melalui hasil dan kualitas yang terukur. Pembangunan berkelanjutan adalah proses berprinsip yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan tujuan memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Keberlanjutan adalah ide abstrak dengan berbagai tujuan dan aspek terkait. Menafsirkan kompleksitas ini membutuhkan alat dan pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan Indonesia dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan. Dulu, keberlanjutan terdiri dari tiga aspek utama yang sama-sama terintegrasi, yaitu ekonomi (*economic sustainability*), sosial (*social sustainability*) dan lingkungan (*environmental sustainability*), yang saling bergantung dan saling menguatkan. Pembangunan berkelanjutan dimaknai dengan pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan berarti memastikan kualitas hidup masyarakat, bukan kemampuan ekosistem untuk mengatasinya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa konsep keberlanjutan adalah pembangunan yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan. Konsep tiga pilar pembangunan, sosial, ekonomi dan lingkungan telah banyak dibicarakan, sedangkan pilar terakhir berkaitan dengan kelembagaan atau disebut dengan *governance* belum ramai diperbincangkan. Aspek pembangunan berkelanjutan yang terakhir tersebut merupakan salah satu faktor kunci bagi realisasi dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tata kelola dan stabilitas keamanan diharapkan dapat berkontribusi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Akses terhadap keadilan sangat berpengaruh untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (Alisjahbana dkk, 2018). Konsep keberlanjutan pada dasarnya menyatakan bahwa pembangunan generasi sekarang tidak boleh mengorbankan generasi yang akan datang melalui komitmen mereka terhadap kesejahteraan sosial yang lebih rendah dari kesejahteraan generasi sekarang. Kesejahteraan sosial dalam hal ini berarti kesejahteraan di bidang ekonomi, kesejahteraan di bidang sosial yang meliputi kesehatan dan pendidikan, serta kesejahteraan di bidang lingkungan. Kajian sebelumnya oleh Fauz dan Oxtavianus (2014) menyebutkan bahwa perkembangan beberapa indikator pembangunan memperlihatkan adanya kesenjangan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan di Indonesia. Penelitian tersebut juga belum membahas mengenai pilar kelembagaan. Untuk itu, kami melakukan penelitian kembali dengan menambahkan salah satu indikator baru yakni hukum tata kelola/kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengukuran pembangunan berkelanjutan khususnya di Indonesia. Untuk membuat rencana pengembangan, Anda perlu mengetahui elemen dan faktor apa saja yang dibutuhkan. Pilar keberlanjutan adalah keberlanjutan ekonomi, sosial, lingkungan dan kelembagaan. Dimana pilar-pilar tersebut harus berkembang secara seimbang.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengukuran pembangunan keberlanjutan di Indonesia antara lain yaitu penelitian oleh Rofiqah Ferawati (2018), tentang *Sustainable Development Goals* di Indonesia: Pengukuran dan Agenda Mewujudkannya dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa variabel tersebut mempengaruhi pengurangan kemiskinan, akan tetapi setelah dilakukan uji parsial lewat penetapan metode, yang terpilih adalah *Fixed Effect* dengan Uji *Chow Test* maka secara parsial tidak berpengaruh. Kemudian penelitian oleh Muhamad Suparmoko (2020) tentang Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional. Dari penelitian ini diketahui bahwa perencanaan pembangunan tradisional menganggap sumber daya alam sebagai faktor produksi, yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin tanpa merusak kondisi lingkungan. Akibatnya, pertumbuhan

ekonomi riil muncul sebagai peningkatan pendapatan nasional, tetapi pada saat yang sama kehidupan penuh dengan kekhawatiran akan bencana alam seperti hujan lebat, banjir, kekeringan, negara yang penuh dengan kehidupan. Kekhawatiran terhadap bencana alam seperti banjir, hujan lebat, tanah longsor, kekeringan, bahkan gempa bumi, pendapatan perkapita atau pendapatan nasional yang tinggi tidak menjamin terciptanya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Kemudian penelitian oleh Sandy Kurnia Christmas & Aminah (2019) "*The Principle of Environmental Based Development in International Law and Sustainable Development Goals*", menyatakan bahwa prinsip pembangunan Berkelanjutan dalam Hukum Internasional meliputi: prinsip pemanfaatan, keadilan intra dan antargenerasi, tanggung jawab bersama, pendekatan kehati-hatian, partisipasi public dan akses informasi keadilan, tata kelola yang baik dan prinsip integrasi dan prinsip pembangunan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah perjanjian pembangunan baru untuk mencapai pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mencakup prinsip universal, terpadu juga komprehensif untuk memastikan bahwasanya tidak ada yang terlewatkan dalam proses pembangunan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Berkelanjutan

Perkembangan tersebut diartikan secara energik dari waktu ke waktu. Secara tradisional, pembangunan sederhananya diartikan sebagai usaha untuk pemenuhan kebutuhan manusia dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Seiring berjalan waktu, sekitar tahun 1970-an, pembangunan dimaknai dengan upaya untuk meraih pertumbuhan per kapita, sehingga permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan, diskriminasi, pengangguran, dan distribusi pendapatan kurang mendapat perhatian. Pada tahun 1990-an, konsep pembangunan berubah menjadi fokus terhadap upaya peningkatan kualitas hidup dari pada sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pada abad ke-21 mulai dikenali konsep pembangunan berkelanjutan yang merupakan evolusi dari konsep pembangunan yang tidak hanya menekankan pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan masa depan. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan pada hakekatnya bertujuan untuk mengupayakan pemerataan pembangunan antara generasi sekarang dan yang akan datang (Salim, 1990).

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berarti pembangunan ekonomi, tetapi juga pembangunan emosional, intelektual, intelektual dan moral. Keberlanjutan adalah kunci utama untuk memecahkan masalah yang dihadapi dunia, seperti ketersediaan pangan yang tidak mencukupi, degradasi lingkungan, penipisan sumber daya alam dan hutan, dan gizi buruk serta kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang buruk (kemiskinan). Pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan bersama masyarakat dunia, yang telah menjadi tujuan dan diakui secara luas di masyarakat. Keharmonisan lingkungan dan sosial adalah yang paling penting karena adanya proses saling menguntungkan antara keduanya intelektual sehingga memerlukan pendekatan berorientasi kebijakan dan pendekatan konseptual.

Produk Domestik Regional Bruto

Kriteria penting untuk menentukan keadaan perekonomian suatu daerah pada rentang waktu tertentu yakni dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dalam hal apapun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Bruto (PDB) pada dasarnya merupakan hasil perhitungan total nilai tambah dari seluruh unit bisnis pada wilayah tertentu, atau nilai keseluruhan barang dan jasa akhir (bersih) yang diproduksi oleh semua unit bisnis. PDRB atas dasar harga berlaku memvisualkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dijumlahkan setiap tahun atas dasar harga berlaku, sedangkan produk domestik bruto atas dasar harga konstan memperlihatkan nilai tambah jasa dan barang yang dihitung berdasarkan harga pada tahun tertentu.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah satu dari beberapa indikator terbaik dari kemakmuran suatu negara. IPM adalah indeks komposit yang memuat indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks kesejahteraan. Indeks Kesehatan dapat dinilai dengan harapan hidup penduduk saat lahir, selanjutnya Indeks Pengetahuan menggunakan tingkat melek huruf dan lama belajar formal, dan Indeks Kesejahteraan menggunakan tingkat pendapatan hijau per kapita. Dengan demikian, IPM menginternalisasi biaya eksternal yang mempertimbangkan nilai habisnya atau hilangnya sumber daya alam dan degradasi fungsi lingkungan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator nasional untuk mengukur efisiensi pengelolaan lingkungan hidup yang dapat memberikan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan perlindungan lingkungan hidup. Tujuan IKLH adalah untuk memberikan gambaran umum capaian program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat provinsi hingga nasional. Oleh karena itu, IKLH disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah.
- b. Pertanggungjawaban terhadap publik mencapai tujuan kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah dan pemerintah daerah.
- c. Indikator keberhasilan pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Indeks Demokrasi Indonesia

Demokrasi merupakan konsep yang begitu kuat sehingga setiap upaya untuk menilai demokrasi pasti akan menemui argumen tentang aspek demokrasi mana yang harus diukur. Menurut para ahli, kebebasan sipil adalah isu dasar demokrasi. Tujuan dari semua proses demokrasi adalah untuk menjamin kebebasan. Indeks Demokrasi Indonesia memahami pentingnya kebebasan sipil kala membentuk demokrasi Indonesia dengan memasukkan kebebasan sipil yang diukur dalam IDI (Bappenas, 2011).

Selain aspek kebebasan sipil, IDI juga memeriksa pengalaman demokratisasi di Indonesia dan memahami bahwa hak politik dan institusi demokrasi turut merupakan aspek yang amat penting dan setara dengan kebebasan sipil. Olehnya, kedua aspek tersebut dimasukkan sebagai aspek yang diukur dalam IDI. Aspek kebebasan sipil dan hak politik mencerminkan inti dari konsep demokrasi. Namun demikian, kedua esensi dasar demokrasi tersebut tidak dapat berfungsi secara optimal tanpa adanya “media”, struktur dan mekanisme pendukung, sehingga pranata demokrasi juga merupakan bagian penting dari demokrasi dan merupakan aspek ketiga dalam penyusunan IDI (Bappenas, 2011).

Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia terdiri dari tiga tahapan proses. Pertama menghitung indeks akhir untuk setiap indikator. Langkah selanjutnya adalah perhitungan indeks lokal. Terakhir, dihitung indeks komposit atau indeks demokrasi Indonesia. Ketiga fase ini terkait secara hierarkis. Perhitungan indeks indikator mendahului dan berkontribusi terhadap perhitungan indeks variabel, indeks variabel penentu perhitungan indeks aspek, indeks aspek penentu indeks provinsi dan terakhir indeks provinsi penentu indeks demokrasi Indonesia. Namun, sebelum indeks tersebut dapat dihitung, terdapat proses khusus untuk mendapatkan bobot dari masing-masing variabel, aspek, dan indikator yang membentuk indeks total.

Pencapaian kegiatan demokrasi di tiap provinsi dapat dilihat dari skala 1 sampai dengan 100. Skala ini adalah skala normatif, dengan 1 mewakili efisiensi terendah sedang 100 mewakili efisiensi tertinggi. Kinerja terendah (nilai indeks 1) secara teoritis bisa dicapai jika semua indikator mendapat nilai terendah (nilai 1). Sebaliknya, kinerja terbaik (skor indeks 100) secara teori dimungkinkan jika semua indikator mendapatkan skor tertinggi (skor 5). Skala 1-100 dibagi menjadi tiga kategori kegiatan demokrasi: baik (indeks > 80), sedang (indeks 60-80), dan buruk (indeks < 60).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang termasuk dalam lingkup analisis deskriptif. Penggunaan ilustrasi disampaikan dengan menyelidiki informasi dalam bentuk grafik dan tabel. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari publikasi dari Lembaga yang mengurus permasalahan pembangunan berkelanjutan seperti Bappenas dan BPS. Ada dua cara yang digunakan untuk mengevaluasi pembangunan berkelanjutan, yaitu dengan penggunaan indikator pembangunan parsial dan penggunaan indeks komposit.

Indeks komposit merupakan indikator-indikator yang tidak mempunyai satuan pengukuran. Setiap indeks komposit dapat dilihat sebagai model, dan langkah-langkah yang digunakan dalam pembuatannya harus diikuti agar indeks dapat berguna dan diterima secara luas. Langkah-langkah pembuatan indeks komposit merujuk pada penelitian Fauzi dan Oxtavianus (2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Pembangunan dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum dan tata kelola pada periode pembangunan jangka menengah telah memiliki banyak capaian. Dari aspek ekonomi, Indonesia mampu mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi positif sebesar 4 hingga 5,7% setiap tahunnya dari tahun 2019 hingga 2022. Pendapatan per kapita penduduk Indonesia meningkat dari Rp 51,9 juta menjadi Rp 71.000.000 pada tahun 2022 seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka positif tersebut.

Aspek sosial juga mengalami banyak kemajuan, dengan Angka Partisipasi Murni (APM) SD mencapai 97,88% pada tahun 2022 dan APM SMP mencapai 80,89%. Begitu pula Angka Melek Huruf (AMH) yang mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2019. AMH nasional pada 2022 mencapai 93,35 persen. Angka kematian bayi telah menurun secara signifikan di bidang sosial lainnya, mencapai 16,85 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2022. Hal ini berarti dari setiap 1.000 anak yang lahir dengan aman, sekitar 16 di antaranya meninggal sebelum tiba di usia 1 tahun.

Tabel 1. PDRB Harga Konstan Tahun 2019-2022

PROVINSI	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan Per Tahun
PROVINSI ACEH	132.069,62	131.580,97	135.251,19	140.947,64	2,69%
PROVINSI SUMATERA UTARA	539.513,85	533.746,36	547.651,82	573.528,77	2,87%
PROVINSI SUMATERA BARAT	172.205,57	169.426,61	175.000,50	182.629,54	2,76%
PROVINSI RIAU	495.607,05	489.995,75	506.471,91	529.532,98	2,40%
PROVINSI JAMBI	149.111,09	148.354,25	153.825,49	161.717,68	3,16%
PROVINSI SUMATERA SELATAN	315.464,75	315.129,22	326.411,27	343.483,65	3,60%
PROVINSI BENGKULU	46.345,45	46.338,43	47.853,78	49.916,06	3,13%
PROVINSI LAMPUNG	244.378,31	240.319,59	246.966,49	257.534,19	2,66%
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	53.941,90	52.705,94	55.369,65	57.803,20	2,62%
PROVINSI KEPULAUAN RIAU	181.877,67	174.959,21	180.952,44	190.163,70	2,39%
PROVINSI DKI JAKARTA	1.836.240,55	1.792.291,09	1.856.075,82	1.953.455,85	3,06%
PROVINSI JAWA BARAT	1.490.959,69	1.453.380,72	1.507.746,39	1.589.984,93	2,92%
PROVINSI JAWA TENGAH	991.516,54	965.227,27	997.345,05	1.050.322,13	2,84%
PROVINSI DI YOGYAKARTA	104.485,46	101.698,52	107.372,56	112.898,32	3,66%
PROVINSI JAWA TIMUR	1.649.895,64	1.611.392,55	1.668.749,44	1.757.821,43	3,02%
PROVINSI BANTEN	456.620,03	441.148,58	460.963,02	484.141,83	2,85%
PROVINSI BALI	162.693,36	147.498,94	143.864,97	150.821,44	-0,34%
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	93.872,44	93.288,87	95.437,86	102.074,07	3,13%
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	69.389,02	68.809,61	70.540,66	72.695,28	2,50%
PROVINSI KALIMANTAN BARAT	137.243,09	134.743,38	141.212,04	148.368,94	3,28%
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	100.349,29	98.933,61	102.481,47	109.094,72	3,69%
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	133.283,85	130.864,32	135.422,59	142.339,28	2,72%
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	486.523,18	472.393,33	484.438,88	506.158,91	2,21%
PROVINSI KALIMANTAN UTARA	61.417,79	60.746,21	63.162,97	66.534,39	3,78%
PROVINSI SULAWESI UTARA	89.009,26	88.126,37	91.790,93	96.767,70	3,56%
PROVINSI SULAWESI TENGAH	127.935,06	134.152,69	149.848,82	172.578,03	10,14%
PROVINSI SULAWESI SELATAN	330.506,38	328.154,57	343.395,41	360.874,18	3,98%
PROVINSI SULAWESI TENGGARA	94.053,52	93.445,72	97.276,36	102.657,94	3,87%
PROVINSI GORONTALO	28.429,97	28.425,38	29.110,05	30.286,45	3,21%
PROVINSI SULAWESI BARAT	32.843,81	32.074,02	32.898,23	33.654,78	2,02%
PROVINSI MALUKU	31.049,45	30.765,89	31.702,75	33.321,87	3,16%
PROVINSI MALUKU UTARA	26.597,55	28.031,44	32.739,16	40.248,39	12,84%
PROVINSI PAPUA BARAT	62.074,52	61.604,13	61.289,40	62.518,38	0,85%
PROVINSI PAPUA	134.565,89	137.787,29	158.674,30	172.904,85	2,69%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Untuk menilai pembangunan Indonesia, tidak cukup hanya dengan ringkasan pembangunan sosial dan ekonominya. Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan bidang-bidang lain agar pembangunan dapat berkelanjutan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu aspek lingkungan dan hukum dan tata kelola. Dari aspek ekonomi, seperti yang digambarkan sebelumnya, perkembangan ekonomi di Indonesia menunjukkan tren yang positif. Pada periode 2019 - 2022, di tengah keadaan darurat yang melanda negara-negara di dunia akibat virus Corona, perekonomian Indonesia sanggup tumbuh dengan rata-rata 3,35% per tahun.

Dua indeks komposit yang tersedia dapat digunakan untuk membandingkan pembangunan lingkungan dengan pembangunan sosial dan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang paling banyak digunakan dan Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH). IPM merupakan indeks gabungan yang mengukur aspek-aspek utama pencapaian status penduduk dasar: IPM adalah patokan yang sering dipakai untuk menilai tingkat pencapaian pembangunan sosial juga ekonomi. Ini memperhitungkan faktor-faktor seperti umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan keterampilan, dan aksesibilitas ke sumber daya yang diperlukan untuk mencapai standar hidup yang layak. Sebaliknya, IKLH adalah indeks gabungan yang menilai hasil pembangunan sektor lingkungan.

Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

PROVINSI	IPM								IKLH							
	2019		2020		2021		2022		2019		2020		2021		2022	
	IPM	Rank														
PROVINSI ACEH	71,90	11	71,99	11	72,18	12	72,80	12	76,12	8	75,61	7	75,56	8	78,29	7
PROVINSI BALI	75,38	5	75,50	5	75,69	5	76,44	5	63,09	23	71,99	16	70,70	24	70,89	24
PROVINSI BANTEN	72,44	8	72,45	8	72,72	8	73,32	8	51,09	32	59,37	33	64,14	32	63,41	33
PROVINSI BENGKULU	71,21	18	71,40	18	71,64	18	72,16	18	64,41	22	69,92	23	71,45	20	70,82	25
PROVINSI DI YOGYAKARTA	79,99	2	79,97	2	80,22	2	80,64	2	49,24	33	66,65	31	65,66	31	65,96	31
PROVINSI DKI JAKARTA	80,76	1	80,77	1	81,11	1	81,65	1	42,84	34	52,98	34	54,43	34	54,65	34
PROVINSI GORONTALO	68,49	28	68,68	28	69,00	27	69,81	27	74,97	9	75,31	8	77,32	7	79,79	4
PROVINSI JAMBI	71,26	17	71,29	17	71,63	19	72,14	19	68,06	15	70,87	17	69,04	27	70,32	27
PROVINSI JAWA BARAT	72,03	10	72,09	10	72,45	10	73,12	10	51,64	31	59,40	32	62,68	33	64,52	32
PROVINSI JAWA TENGAH	71,73	13	71,87	13	72,16	13	72,79	13	60,97	28	67,62	29	66,27	30	66,77	30
PROVINSI JAWA TIMUR	71,50	15	71,71	15	72,14	14	72,75	14	60,25	29	67,07	30	68,29	29	69,92	28
PROVINSI KALIMANTAN BARAT	67,65	30	67,66	30	67,90	30	68,63	30	65,92	18	70,07	22	72,59	17	71,90	22
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	70,72	22	70,91	22	71,28	20	71,84	20	61,94	26	68,43	28	71,06	22	71,97	21
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	70,91	21	71,05	21	71,25	21	71,63	22	74,20	10	72,74	15	75,04	11	76,62	11
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	76,61	3	76,24	3	76,88	3	77,44	3	80,87	3	76,46	5	75,06	10	74,46	13
PROVINSI KALIMANTAN UTARA	71,15	20	70,63	20	71,19	22	71,83	21	78,98	6	78,49	3	80,85	2	80,67	3
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	71,30	16	71,47	16	71,69	16	72,24	16	64,85	20	73,50	11	72,05	19	71,67	23
PROVINSI KEPULAUAN RIAU	75,48	4	75,59	4	75,79	4	76,46	4	67,00	17	70,51	21	73,19	16	74,13	15
PROVINSI LAMPUNG	69,57	24	69,69	24	69,90	24	70,45	24	57,37	30	69,46	26	68,56	28	69,10	29
PROVINSI MALUKU	69,45	26	69,49	26	69,71	26	70,22	26	79,55	5	75,98	6	78,23	4	77,69	8
PROVINSI MALUKU UTARA	68,70	27	68,49	27	68,76	28	69,47	28	78,44	7	74,71	9	77,45	6	78,84	5
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	68,14	29	68,25	29	68,65	29	69,46	29	64,56	21	70,83	18	69,70	25	70,56	26
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	65,23	32	65,19	32	65,28	32	65,90	32	69,67	13	73,28	12	74,97	12	73,49	17
PROVINSI PAPUA	60,84	34	60,44	34	60,62	34	61,39	34	81,79	2	79,75	1	80,23	3	81,46	2
PROVINSI PAPUA BARAT	64,70	33	65,09	33	65,26	33	65,89	33	83,96	1	78,65	2	81,80	1	84,22	1
PROVINSI RIAU	73,00	6	72,71	6	72,94	7	73,52	7	62,47	25	69,41	27	70,72	23	72,10	20
PROVINSI SULAWESI BARAT	65,73	31	66,11	31	66,36	31	66,92	31	72,03	11	73,60	10	75,41	9	76,77	10
PROVINSI SULAWESI SELATAN	71,66	14	71,93	14	72,24	11	72,82	11	67,61	16	70,70	19	73,32	15	74,17	14
PROVINSI SULAWESI TENGAH	69,50	25	69,55	25	69,79	25	70,28	25	80,23	4	77,53	4	77,78	5	78,66	6
PROVINSI SULAWESI TENGGARA	71,20	19	71,45	19	71,66	17	72,23	17	72,03	12	72,82	13	74,97	13	76,88	9
PROVINSI SULAWESI UTARA	72,99	7	72,93	7	73,30	6	73,81	6	65,15	19	70,69	20	72,38	18	72,37	18
PROVINSI SUMATERA BARAT	72,39	9	72,38	9	72,65	9	73,26	9	69,64	14	72,79	14	73,58	14	74,98	12
PROVINSI SUMATERA SELATAN	70,02	23	70,01	23	70,24	23	70,90	23	61,41	27	69,71	25	69,16	26	72,12	19
PROVINSI SUMATERA UTARA	71,74	12	71,77	12	72,00	15	72,71	15	62,49	24	69,90	24	71,15	21	74,11	16

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Tabel 2 menunjukkan bahwa peringkat IPM dan IKLH berbeda secara signifikan satu sama lain, dengan peringkat IPM yang paling mencolok. Provinsi DKI Jakarta, misalnya, memiliki peringkat IKLH yang buruk meskipun memiliki skor IPM yang tinggi. Skor IPM DKI Jakarta berada di atas, sedangkan skor IKLH berada di bawah. Kemudian lagi, daerah dengan evaluasi IKLH yang besar, misalnya daerah Papua. Skor IPM provinsi ini berada pada peringkat ke 34, tetapi peringkat IKLH-nya adalah yang pertama pada tahun 2019, 2021, dan 2022.

Berdasarkan indikator pembangunan tersebut, tampaknya terdapat tren pembangunan yang berdampak pada perbaikan kondisi sosial dan ekonomi. Sejumlah penelitian, termasuk Muliza et al. (2017: 67), telah menunjukkan adanya hubungan positif antara kedua dimensi tersebut, yang menunjukkan korelasi positif antara PDRB dan IPM. Meskipun demikian, peningkatan aspek sosial dan ekonomi seringkali harus dibayar mahal oleh kerusakan ekologis dengan banyaknya peristiwa bencana yang diakibatkannya. Pembangunan sosial dan ekonomi memberi banyak tekanan pada lingkungan.

Melihat segenap dari indikator pembangunan tersebut, terlihat adanya tren pembangunan yang menuju pada perbaikan sosial juga ekonomi. Ada beberapa riset yang mengisyaratkan adanya hubungan positif antara dua dimensi tersebut, antaranya Muliza et al (2017: 67) yang membuktikan adanya hubungan positif antara PDRB dengan IPM. Namun peningkatan taraf

hidup sosial dan ekonomi terbilang kerap kali harus ditukar dengan terciptanya kerusakan lingkungan yang menyebabkan timbulnya bencana alam. Lingkungan mendapat beban yang keras sebagai balasan dari adanya perkembangan sosial dan ekonomi yang terjadi. Kendatipun kemajuan pada bidang pengelolaan ekologi meningkat dengan upaya-upaya perlindungan, seperti kawasan konservasi, kakuatiran alam lainnya, ketegangan iklim masih terasa kuat sepanjang beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari indikator bencana alam terkait hidrometeorologi.

Antara tahun 2013 dan 2022, terjadi 8.728 kasus banjir dan 7.301 kasus tanah longsor telah didokumentasikan. Emisi gas rumah kaca meningkat akibat aktivitas industri dan konsumsi bahan bakar. Emisi CO₂ akan mencapai 2,3 ton per kapita pada tahun 2022 yang sebelumnya berada <1 ton per kapita pada awal tahun 1990-an. Permasalahan antara aspek-aspek kemajuan ini akan semakin jelas ketika dianalisis kenaikan PDRB, IPM, IKLH, dan IDI.

Indeks Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Penelitian yang mengukur pembangunan berkelanjutan di Indonesia pernah dilakukan oleh Fauzi dan Oxtavianus (2014) yang menggabungkan indikator produk domestik regional bruto (PRDB) per kapita, indeks pembangunan manusia (IPM), dan indeks kualitas lingkungan (IKLH) menjadi indeks komposit tunggal yang memberikan indikator komprehensif pembangunan berkelanjutan dari aspek ekonomi, sosial, perspektif lingkungan. Namun, aspek hukum dan tata kelola merupakan salah satu pilar dari tujuan pembangunan berkelanjutan tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini. Kajian ini merupakan perluasan dari penelitian Fauzi dan Oxtavianus (2014) dengan menambahkan perspektif hukum dan tata kelola untuk mengukur pembangunan berkelanjutan yang terjadi Indonesia.

Kajian ini menggunakan beberapa indikator utama untuk menilai kemajuan pembangunan Indonesia. Nilai PDRB per kapita digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi. IPM yang merupakan gabungan dari indikator kesehatan, pendidikan, dan daya beli digunakan untuk mengukur pencapaian sosial. IKLH saat ini digunakan dalam pencapaian pembangunan lingkungan. Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) digunakan untuk mengukur kemajuan di bidang hukum dan tata kelola. Menggabungkan keempat indikator kemajuan ini menjadi satu indeks komposit akan menciptakan indikator pembangunan berkelanjutan yang baik dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum dan tata kelola. Keempat indikator ini diyakini dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi indikator yang baik dari segi relevansinya dengan fenomena yang diukur, ketersediaannya, cakupan spasialnya, dan tingkat reliabilitasnya sehingga dimasukkan ke dalam Indeks Pembangunan Berkelanjutan (IPB) untuk mengukur pembangunan berkelanjutan

Setelah memilih indikator, langkah selanjutnya dalam penyusunan IPB adalah membakukan semua indikator ke dalam bentuk indeks, khususnya PDRB, karena tiga indikator lainnya (IPM, IKLH, dan IDI) sudah dalam bentuk indeks. Langkah pertama dalam membuat indeks PDRB per kapita adalah menentukan nilai maksimum dan minimum yang diinginkan. Berdasarkan target pencapaian RPJMN 2020-2024 PDRB per kapita atas dasar harga konstan, nilai maksimum dalam kajian ini dihitung sebesar US\$6.160 atau Rp86.240.000 per tahun. Sedangkan nilai minum merupakan angka garis kemiskinan daerah perkotaan tahun 2020 sebesar Rp.458.974 rupiah per bulan atau Rp.5.507.688 per tahun. Rumusan untuk penghitungan ditunjukkan oleh persamaan berikut.

$$\text{Indeks PDRB} = \frac{\text{PRDB Perkapita} - 5.507.688}{86.240.000 - 5.507.688} \times 100$$

Langkah selanjutnya dalam menghitung IPB yaitu dengan melakukan penentuan bobot untuk masing-masing indikator penyusun setelah dibakukan. Dalam penelitian ini, indikator diberi bobot yang moderat, dengan masing-masing komponen IPB mendapatkan bobot yang sama. Komponen penyusun IPB itu sendiri tergantung pada indikator penyusunnya (data PDRB, IPM, IKLH, dan IDI). Semua indikator diberikan bobot yang sama sebesar seperempat (1/4).

$$\text{IPB} = \frac{\text{Indeks PDRB} + \text{IPM} + \text{IKLH} + \text{IDI}}{4}$$

Perhitungan IPB berdasarkan provinsi disajikan pada tabel berikut.

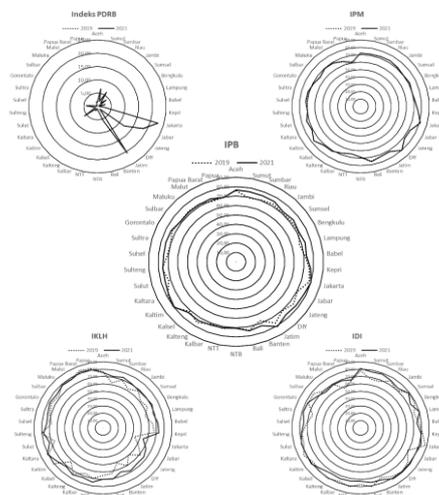
Tabel 3. Nilai IPB

PROVINSI	2019	2020	2021
Provinsi Aceh	75,86	74,36	76,76
Provinsi Sumatera Utara	69,5	71,11	75,82
Provinsi Sumatera Barat	70,59	73,4	75,61
Provinsi Riau	72,25	74,99	75,18
Provinsi Jambi	70,29	73,15	71,81
Provinsi Sumatera Selatan	71,41	72,79	74
Provinsi Bengkulu	71,64	71,34	72,11
Provinsi Lampung	67,49	71,62	73,88
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	71,17	74,31	72,82
Provinsi Kepulauan Riau	75,43	74,97	76,89
Provinsi Dki Jakarta	78,19	81,7	80,18
Provinsi Jawa Barat	70,39	73,58	77,82
Provinsi Jawa Tengah	74,04	75,6	77,29
Provinsi Di Yogyakarta	70,38	76,47	76,12
Provinsi Jawa Timur	76,6	76,46	80,78
Provinsi Banten	67,24	71,01	72,81
Provinsi Bali	73,93	75,61	74,48
Provinsi Nusa Tenggara Barat	70,14	71,48	70,72
Provinsi Nusa Tenggara Timur	72,24	72,18	71,49
Provinsi Kalimantan Barat	70,95	73,47	72,07
Provinsi Kalimantan Tengah	75,81	73,29	73,55
Provinsi Kalimantan Selatan	71,24	71,65	73,12
Provinsi Kalimantan Timur	80,37	80,16	79,63
Provinsi Kalimantan Utara	78,09	76,01	77,38
Provinsi Sulawesi Utara	72,08	74,55	75,72
Provinsi Sulawesi Tengah	76,17	74,84	75,77
Provinsi Sulawesi Selatan	71,29	71,41	74,87
Provinsi Sulawesi Tenggara	69,85	71,03	75,24
Provinsi Gorontalo	73,34	75,83	74,54
Provinsi Sulawesi Barat	71,84	71,04	71,14
Provinsi Maluku	72,51	73	71,67
Provinsi Maluku Utara	72,43	71,72	71,79
Provinsi Papua Barat	68,99	68,73	72,14
Provinsi Papua	69,83	68,79	69,71
NASIONAL	72,46	73,58	74,56

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Secara umum, terjadi perkembangan indeks pembangunan berkelanjutan pada tahun 2019 ke tahun 2021. Akan tetapi indeks tersebut mengalami penurunan di sejumlah provinsi, antara lain Sulawesi Tengah dan Papua. Grafik radar pada Gambar 1 menunjukkan bahwa penurunan capaian pembangunan lingkungan menjadi penyebab penurunan capaian

pembangunan berkelanjutan di Papua dan Sulawesi Tengah.



Gambar 1. Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Turunnya capaian pembangunan kedua provinsi tersebut berbanding terbalik dengan capaian pembangunan ekonomi yang justru mengalami peningkatan dan merupakan yang tertinggi di Indonesia. Hal ini menunjukkan dampak positif dari pembangunan ekonomi lebih kecil dari pada penurunan kualitas lingkungan, khusus di Papua kondisi tersebut juga diperparah dengan menurunnya pembangunan manusia. Kalimantan Timur adalah provinsi lain di mana pencapaian pembangunan berkelanjutan mengalami penurunan. Turunnya capaian pembangunan di Kalimantan Timur lantaran turunnya pencapaian pembangunan lingkungan dan ekonomi. Berkurangnya nilai tambah yang berasal dari penggalian dan pertambangan menjadi alasan utama dibalik turunnya pencapaian ekonomi. Keadaan ini turut diperparah oleh turunnya kualitas lingkungan. Penurunan capaian pembangunan lainnya terjadi di Maluku dan Maluku Utara yang mana selain disebabkan oleh penurunan pembangunan lingkungan, penurunan pembangunan hukum dan tata kelola juga menyebabkan terjadinya penurunan pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Peningkatan sejumlah indikator pembangunan menandakan kurang seimbangya pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum dan tata kelola di Indonesia. Hasil perbandingan antara IPM dan IKLH menunjukkan bahwa provinsi dengan peringkat IPM baik, justru mengantongi peringkat IKLH yang kurang baik, dan begitupun sebaliknya. Sementara itu, terdapat hubungan positif antara PDRB dengan IPM, yang mana semakin tinggi PDRB, akan meningkat pula nilai IPM. Hasil penghitungan nilai IPB menunjukkan adanya perkembangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia selama kurun waktu 2019-2021. Perkembangan tersebut sebagian besar disebabkan adanya peningkatan pada aspek lingkungan yang peningkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan aspek yang lain. Studi ini menyampaikan salah satu bukti empirik bahwasanya keseimbangan pembangunan antar dimensi (sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum dan tata kelola) begitu dibutuhkan dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang menitikberatkan pada salah satu dimensi saja akhirnya akan terkoreksi oleh degradasi dimensi lainnya. Untuk penelitian selanjutnya

kiranya dapat menggunakan data penelitian yang lebih updated dengan keadaan sekarang, selain itu juga diharapkan dapat menggunakan indikator yang berbeda dalam mengukur pembangunan berkelanjutan untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, dkk. 2018. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*. UNPAD: Bandung.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2023. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha*. (Katalog BPS: 9302001). Jakarta: BPS.
- BNPB. *Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)* (Internet). Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2019.
- Bappenas. 2011. *Indeks Demokrasi Indonesia 2009. Menakar Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- Brito L. 2012. Analyzing Sustainable Development Goals. *Science* 336, 1396.
- Christmas, Sandy Kurnia & Aminah. 2019. The Principle of Environmental Based Development in International Law and Sustainable Development Goals. *Jurnal Hukum Novelt*. 10(02), 101-110.
- Fauzi, Akhmad dan Alex Oktavianus. 2014. Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *MIMBAR* Vol. 30 (1) 41-52.
- Ferawati, Rofiqah. 2018. Sustainable Development Goals di Indonesia: Pengukuran dan Agenda Mewujudkannya dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan* 33(2). 143-167.
- Grigs, D. et al. 2013. *Policy: Sustainable Development Goals for People and Planet*. Nature, 495 (305).
- Hadad, Ismid. 2010. “*Gerakan Lingkungan dan ADvokasi Pembangunan Berkelanjutan*” dalam Iwan Jaya Azis, Lydia M. Napitupulu, Arianto Patturu dan Budi Reksosudarmo. *Pembangunan Berkelanjutan, Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Kepustakaan Populer Gramedia: Jakarta.
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2019*.
- Litting, B. & Griessler, 2005. E. Social Sustainability: a catchword between political pragmatism and social theory. *Int. J. Sustain. Dev* 9, 65-79.
- Muliza, Zulham, T & Seftarita, Chenny. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB terhadap IPM Di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i1.6993>
- Suparmoko, Muhamad. 2020. Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*. 9(01).39-50.